

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian

2.1 Pembangunan Wilayah

Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang multidimensional, yang melibatkan segenap pengorganisasian dan peninjauan kembali atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Selain peningkatan pendapatan dan output, proses pembangunan itu juga berkenaan dengan serangkaian perubahan yang bersifat mendasar atas struktur-struktur kelembagaan, sosial, dan administrasi, sikap-sikap masyarakat dan bahkan seringkali juga merambah adat-istiadat, kebiasaan, dan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan (Todaro, 2000). Kesejahteraan memang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi, bahkan kapasitas ekonomi seringkali ditempatkan sebagai prasyarat utama dalam memajukan taraf hidup manusia. Suatu pertumbuhan memang penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya. Namun pertumbuhan bukan merupakan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi hanyalah satu alat yang penting.

Pemahaman inilah yang seringkali membuat para perencana pembangunan mengabaikan hakikat dari pembangunan itu sendiri. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya, dan pada gilirannya bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya. Kuncoro (1997) mengartikan kapabilitas sebagai mencakup apa yang dapat maupun tidak dapat dilakukan, misalnya bebas dari kelaparan, dari kekurangan gizi, partisipasi dalam masyarakat, memperoleh tempat tinggal yang memadai, dan sebagainya.

Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses ekspansi dari kebebasan positif yang dinikmati

oleh masyarakat (Paskarina, 2007). Dari perspektif ini, pembangunan baru akan bermakna manakala terjadi peningkatan martabat manusia yang mampu membebaskannya dari belenggu-belenggu kemiskinan dan keterbatasan akses. Inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari pembangunan manusia, yakni berfokus pada manusia, untuk memulihkan dan meningkatkan martabat manusia.

Pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang (*balance development*). Pembangunan yang berimbang adalah terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam (Murry, 2000). Pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan sektoral, spasial, serta keterpaduan antar pelaku (*institutions*) pembangunan di dalam dan antar wilayah. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional yang sinergis antar sektor pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dalam kelembagaan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan anatara sektor ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer *input* dan *output* barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis.

2.2 Pendekatan Indikator Sosial

Indikator harus didefinisikan secara tepat, tetapi bisa saja ada yang merefleksikan lebih dari apa yang diukur. Indikator bisa dipandang suatu jendela untuk melihat semesta yang lebih luas, sehingga dapat merefleksikan suatu perspektif yang lebih luas dibandingkan dengan fokus utama. Indikator bersifat kuantitatif dan bisa diukur, dan juga bisa dipergunakan untuk merefleksikan tentang proses dan interpretasi kualitatif (*The Danish Institute for Human Rights* Copenhagen, 2006). Artinya indikator mempunyai banyak unsur-unsur sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Indikator adalah sarana-sarana antara yang digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari suatu urusan negara pemerintah daerah serta untuk mengukur perubahan seperti bidang sosial dalam pembangunan. Misalnya indeks

pembanguna Manusia: tingkat harapan hidup pada kelahiran, tingkat melek huruf pada dewasa, dan rata-rata lama sekolah.

Metode indikator sosial untuk mengukur pembangunan yang tidak seimbang dapat mengisi beberapa kesenjangan empiris. Premis dasar ukuran kesejahteraan non-moneter adalah bahwa pendapatan itu sendiri bukanlah indikator kesejahteraan. Mereka dapat dihasilkan sebagai bagian dari data sensus atau data akuntansi sosial, dengan cakupan dan representasi yang lebih besar. Selanjutnya, dari sudut pandang para perencana tata ruang, aspek-aspek tertentu dari kemajuan sosial (misalnya, kesehatan, pendidikan, dan gizi) mungkin lebih mudah dipahami dan dapat dipantau daripada perkiraan umum ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Andiyanatul, 1990).

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mempelajari perbedaan antar negara dengan menggunakan indikator sosial, ada juga kebutuhan untuk mempelajari ketidakseimbangan regional di dalam negara, terutama mengingat fakta bahwa pemerintah negara-negara terutama di negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sangat sadar untuk memenuhi beberapa tujuan sosial (misalnya, peningkatan tingkat kehidupan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kesenjangan, dll.) dalam ekonomi nasional dan antara wilayah geografis yang berbeda. Dengan adanya beberapa indikator, suatu wilayah atau provinsi mungkin tinggi pada satu ukuran, dan rendah pada yang lain, sehingga agak berbahaya untuk terlibat dalam perbandingan keseluruhan di seluruh wilayah.

Meskipun ada perdebatan yang cukup besar di antara para ekonom tentang definisi, konstruksi, dan batas indikator sosial, ada lebih atau kurang konsensus bahwa studi yang ditujukan untuk pengukuran dan perbandingan tingkat kehidupan harus mencakup indikator yang berkaitan dengan bidang sosial seperti struktur kependudukan, kesehatan, gizi, perumahan, pendidikan, dan pembangunan budaya. Karena perkembangan sosial dan ekonomi saling terkait, banyak ekonom menyarankan dimasukkannya beberapa indikator ekonomi umum serta untuk pengukuran standar hidup. Di Indonesia, indikator-indikator yang merepresentasikan data tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia yang terdapat unsur Angka

Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, dan PNB per kapita. Sedangkan untuk melihat kesejahteraan rakyat, dapat diketahui dengan tingkat penanggulangan kemiskinan yang dapat dihitung dengan jumlah presentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan di Indonesia.

2.3 Pembangunan Manusia dalam Pembangunan Nasional

Menurut Todaro dalam (Istiqomah, 2018) pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Perdebatan tentang indikator pembangunan sosial-ekonomi sudah sejak lama terjadi. Pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan telah digugat oleh kalangan ekonomi maupun non-ekonomi yang melihat ketidakakuratan indikator tersebut, yang kemudian memunculkan beberapa indikator baru. Indikator baru tersebut secara umum berfokus pada pembangunan manusia. Gilley dan Eggland (1989: 14) dalam (Azahari, 2000) menyatakan bahwa *human development* merujuk kepada kemajuan (*advancement*) dari pengetahuan, kompetensi dan perbaikan perilaku-perilaku sumberdaya manusia itu sendiri, baik untuk kepentingan individual maupun untuk kepentingan organisasi.

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya “*Global Human Development Report*” memperkenalkan konsep Pembangunan Manusia (*Human Development*) sebagai paradigma baru model pembangunan. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka. Pembangunan manusia memiliki pengaruh yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ranis & Stewart (2006) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan kontributor dari stabilnya proses pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan fundamental pembangunan, tetapi juga sebagai faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu.

Basri dan Munandar (2009) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan proksi yang tepat untuk menggambarkan kondisi pembangunan manusia. Selain itu, menurut Noorbakhsh (2002), kebijakan negara memiliki peran penting terhadap pembangunan, termasuk di dalamnya yaitu pembangunan manusia. Komitmen negara dalam meningkatkan pembangunan manusia haruslah didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara, serta kemudian direalisasikan dengan program-program yang nyata. Di Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

- a) Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- b) Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- c) Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- d) Rendah : IPM kurang dari 50,0

Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga terdapat indikator lain yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. Penelitian ini menggunakan dua indikator lainnya selain IPM tersebut karena sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goal's, yaitu kesetaraan gender.

2.4 Indikator Pembangunan Manusia

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia, UNDP telah mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Index/HDI*). Selain IPM, sejak tahun 1995 UNDP telah mengembangkan pula alat ukur lain, yang ditujukan pula untuk menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara. Alat ukur tersebut adalah Indeks Kemiskinan Manusia/IKM (*Human Poverty Indeks/HPI*) dan Indeks Pembangunan Jender/IPJ (*Gender Development index/ GDI*). IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komparatif dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup di semua negara. Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kualitas pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, juga digunakan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM diperkenalkan oleh salah satu lembaga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). UNDP mencoba memeringkat semua negara dari skala 0

(terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia di negara tersebut. Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya (UNDP, 1995):

- Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan.. Harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dimensi ketiga dari pembangunan manusia adalah penguasaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator dimensi ini. Akan tetapi, mengingat tidak semua wilayah di Indonesia memiliki indikator tersebut, maka dipilih alternatif lain dengan memanfaatkan indikator pendapatan/pengeluaran. Indikator ini tersedia hingga level wilayah kabupaten/kota.

Perubahan Metodologi IPM

1. 1990

Launching: Komponen IPM yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode yang digunakan adalah agregasi dengan rata-rata aritmatik.

2. 1991

Penyempurnaan: Komponen IPM yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan PDB per kapita.

3. 1995

Penyempurnaan: Komponen IPM yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Kombinasi Angka Partisipasi Pasar (APK), dan PDB per kapita.

4. 2010

UNDP mengubah metodologi: Komponen IPM yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan PNB per kapita. Metode yang digunakan adalah agregasi dengan menggunakan rata-rata geometrik.

5. 2011

Penyempurnaan: Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2008 menjadi 2005.

6. 2014

Penyempurnaan: Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011 dan mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Perubahan mendasar dalam perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator harapan lama sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup. Agregasi indeks juga

mengalami perubahan. Semula, agregasi indeks menggunakan rata-rata hitung aritmatik. Pada IPM dengan metode baru, perhitungan indeks menggunakan rata-rata geometrik.

Alasan mendasar diubahnya metodologi IPM yaitu karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM, seperti Angka Melek Huruf yang sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, Angka Melek Huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Sedangkan pada indikator PDB per kapita, tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. (Badan Pusat Statistik)

2.4.2 Indeks Pembangunan Gender

Dalam *Women Studies* Ensiklopedia dijelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Indeks Pembangunan Gender atau IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan

perempuan. Kesenjangan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berdasarkan pengkategorian Indeks Pembangunan Gender menurut UNDP, maka:

1. Kelompok tinggi, jika $IPG \geq 80$
2. Kelompok menengah atas, jika $66 \leq x < 80$
3. Kelompok menengah bawah, jika $50 \leq x < 66$
4. Kelompok rendah, jika $IPG < 50$

TABEL II. 1
INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Dimensi	Indikator	IPG atau GDI
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan 2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan Pendapatan; Laki-laki & Perempuan	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Interpretasi:

1. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki
2. $IPG < 100$, capaian perempuan < capaian laki-laki
3. $IPG = 100$, capaian perempuan sama dengan laki-laki
4. $IPG > 100$, capaian perempuan > capaian laki-laki

2.4.3 Indeks Pemberdayaan Gender

Tujuan ke-5 dalam Sustainable Development Goal's adalah mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Perempuan. Kesenjangan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi

politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik meliputi partisipasi politik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi, yang disebut dengan dimensi IDG.

TABEL II. 2
INDIKATOR INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Dimensi	Indikator	IDG atau GEM
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan	
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesioanl dan teknisi, laki-laki dan perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan	

Sumber: Badan Pusat Statistik

IDG berasal dari rata-rata aritmatika tiga indeks yang terdiri dari tiga komponen, yaitu partisipasi perempuan di parlemen, kontribusi perempuan terhadap tenaga profesional dan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia berdasarkan gender di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sedangkan IDG mempertimbangkan derajat kesetaraan gender dalam hal peran aktifnya dalam politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

2.5 Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Wilayah

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya (Kementrian PP/PA,

2018). Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan gender diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan. Memerankan rakyat sebagai aktor berarti memerankan perempuan dan laki-laki sebagai aktor. Filosofi ini yang kemudian diterapkan dalam program pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

2.6 Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan perbedaan keadaan atau kinerja ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah. Menurut Karin Vorauer (2007) dalam Aprianoor & Muktiali (2015), ketimpangan wilayah adalah ketidakseimbangan struktur spasial didalam wilayah atau antar wilayah. Sedangkan menurut Kutscherauer, dkk (2010) dalam Aprianoor & Muktiali (2015) ketimpangan wilayah adalah perbedaan atau ketidaksamaan karakteristik, fenomena atau kondisi lokasi dan terjadi minimal diantara dua entitas dari struktur wilayah. Pertumbuhan suatu wilayah tidak serta merta dapat menimbulkan pertumbuhan yang sama didaerah lainnya. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan kepada pemerataan, pertumbuhan dan keberlanjutan. Tidak adanya pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Adanya ketimpangan antar daerah dapat menyebabkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang semakin tajam. Sirojuzilam (2005) menyebutkan bahwa *Regional Income Disparities* atau ketimpangan wilayah adalah Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah didalam wilayah suatu Negara (Aprianoor & Muktiali, 2015).

Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan dapat menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Wilayah maju terus meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor non unggulan yang membebani. Di Indonesia terlihat adanya wilayah yang maju dan yang kurang maju sebagai akibat dari perbedaan tersebut. Maka disinilah peran pemerintah diperlukan dalam penyelesaian ketimpangan pembangunan wilayah sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pemerataan wilayah akan meningkat pula.

2.7 Strategi Peningkatan Pembangunan Manusia di Brunei

Brunei Darussalam adalah negara yang sangat kaya sekaligus negara yang sangat miskin pada saat yang sama. Produk domestik bruto (PDB) per kapita negara itu didefinisikan hampir dengan cara apa pun, tetap menjadi salah satu dari 10 teratas di dunia. Namun, setelah menghilangkan efek pendapatan minyak, Brunei menempati urutan ke-38 antara Yunani dan Oman. Peringkat tersebut mencerminkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia Brunei juga dengan peringkat ke-30 pada Indeks Pembangunan Manusia (HDI) UNDP. Mengikuti tren di sektor publik jangka panjang perencanaan strategis, pejabat senior pemerintah Brunei telah membuat rencana nasional (disebut Wawasan 2035).

Banyak pemerintah telah secara eksplisit menetapkan peningkatan skor IPM mereka sebagai tujuan kebijakan utama, bahkan pemerintah sub-nasional sudah mulai menggunakan indeks pembangunan manusia mereka sendiri (dimodelkan setelah indeks UNDP) untuk mengukur keberhasilan jangka menengah dan panjang dari pembuatan kebijakan tingkat kota. Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan peringkat IPM mereka bergantung (setidaknya sebagian besar) pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi dan masyarakat Brunei mencerminkan aliran pemikiran ini, pembuat kebijakan Brunei hanya perlu meningkatkan tingkat pertumbuhan PDB, maka peningkatan peringkat IPM akan terjadi dengan sendirinya. Kebanyakan ahli melihat pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia sebagai rantai melingkar; pembangunan manusia mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang kemudian melahirkan pembangunan manusia.

Strategi pembangunan nasional Brunei bertujuan untuk mencapai peringkat 10 besar dalam IPM pada tahun 2035. Wawasan 2035, bertujuan untuk menjadikan Brunei Darussalam, pada tahun 2035, negara yang akan diakui secara luas atas pencapaian orang-orangnya yang berpendidikan dan terampil yang diukur dengan standar internasional tertinggi, dengan kualitas hidup yang termasuk dalam 10 negara teratas di dunia dan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan dengan pendapatan per kapita dalam 10 negara teratas di dunia. Tujuan seperti itu sama saja dengan mencapai peringkat 10 besar dalam IPM dan peringkat 10 besar PDB Perkapita.

Untuk mencapai semua tujuan ini, Brunei harus mempertahankan peringkat 10 besar dalam pendapatan per kapita. Secara sederhana, pendapatan tinggi diperlukan untuk membayar tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi. IPM menurut definisinya sudah mewakili gabungan peringkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan Wawasan 2035 jelas membutuhkan pencapaian peringkat 10 besar IPM. Pemeringkatan seperti itu juga membutuhkan peringkat 10 besar pendapatan per kapita. Jadi, Brunei perlu mencapai peringkat 10 besar IPM. Menurut proyeksi yang paling sederhana sekalipun, Brunei tidak akan mampu mencapai peringkat 10 besar IPM tanpa pertumbuhan PDB yang berkelanjutan. (Michael, 2018)

Studi kasus ini menggambarkan bagaimana diversifikasi ekonomi, pembangunan yang diperluas, dan distribusi pendapatan yang lebih merata berkontribusi pada penargetan IPM seperti itu di Brunei. Namun, negara lain mungkin memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda.

2.8 Strategi Peningkatan Pemberdayaan Gender di Negara Berkembang

Memberdayakan perempuan berarti memahami dan menyikapi berbagai dinamika kekuasaan dan hubungan dalam masyarakat tertentu yang terkait dengan masalah usia, kelas, budaya, etnis, gender, sejarah dan ras. Salah satu strategi pemberdayaan perempuan adalah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pemberdayaan perempuan melalui TIK dapat merujuk pada peran yang dimainkan oleh akses ke TIK (komputer, email, Internet, telepon seluler, telepon rumah, radio, televisi, dan televisi digital) dalam memperluas aset dan kemampuan wanita. TIK mencakup berbagai teknologi dan teknik elektronik yang digunakan untuk mengelola informasi dan pengetahuan, seperti yang didefinisikan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): “TIK pada dasarnya adalah alat penanganan informasi - serangkaian barang, aplikasi, dan layanan yang bervariasi yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, memproses, mendistribusikan, dan bertukar informasi.”

Bagi perempuan, pemberdayaan menekankan pentingnya meningkatkan kekuatan mereka dan mengambil kendali atas keputusan dan masalah yang membentuk kehidupan mereka. Hal ini termasuk memiliki akses penuh ke informasi lengkap dan untuk membedakan sendiri kualitas dan kredibilitas informasi tersebut dalam membuat keputusan. TIK memang memiliki potensi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan sosial di negara-negara kurang berkembang (UNDP dan UNIFEM, 2004). Mereka telah terbukti berguna dalam: pemberian perawatan kesehatan; pendidikan jarak jauh; meningkatkan produktivitas pedesaan melalui akses informasi pasar dan akses keuangan; mempromosikan pemberdayaan dan partisipasi dalam proses kebijakan nasional dan internasional; meningkatkan pemberian layanan oleh pemerintah; meningkatkan sistem pemantauan dan respons lingkungan; dan memfasilitasi aktivisme lingkungan.

TIK tentunya dapat berkontribusi dalam mencari solusi pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dan akses terhadap sumber daya. Sementara kebijakan TIK harus berbasis gender, kebijakan gender juga harus menyadari peluang dan tantangan yang dibawa TIK. Kedua kelompok kebijakan dan gender ini perlu saling menyadari dan bekerja sama. Perempuan memiliki banyak kontribusi pengetahuan untuk pembangunan, dan teknologi komunikasi informasi dapat membawa banyak keuntungan untuk mempercepat pembangunan perempuan. Seiring dengan kebijakan, pendidikan dan keterampilan adalah *sine qua non* untuk partisipasi perempuan di era informasi. Mereka adalah kunci bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, menemukan pekerjaan yang lebih baik, atau hanya untuk menggunakan teknologi. Teknologi tersebut tentunya dapat berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dan menemukan solusi atas permasalahan perempuan.

2.9 Kesenjangan Gender di Negara Berkembang

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bobbi Gray (*Research Director at the Grameen Foundation, a global nonprofit dedicated to ending poverty and hunger*) pada penelitiannya yang dilakukan mulai dari India hingga Burkina Faso, salah satu

cara paling efektif untuk memberdayakan perempuan dimanapun, namun khususnya di negara-negara berkembang adalah dengan mendorong kemandirian finansial. Di banyak daerah, hal ini berarti mendukung “kelompok tabungan informal”, yang merupakan sebuah jaringan perempuan yang sepaham dan yang membayar iuran untuk membangun sumber daya bersama. Uang ini bisa dipergunakan untuk mendanai berbagai hal, misalnya saja pengeluaran untuk usaha kecil, biaya sekolah, atau biaya layanan kesehatan. Salah satu proyek terbesarnya bersama organisasinya, Grameen Foundation berada di Burkina Faso, yang merupakan negara sangat miskin di Afrika Barat dimana diperkirakan 55% penduduknya mengalami rawan pangan setidaknya selama setengah tahun. Sejak tahun 1993, organisasi Grameen Foundation telah bekerja dengan lebih dari 73,000 perempuan di hampir 3,300 kelompok tabungan, membawa layanan kepada perempuan yang memerlukannya. Rata-rata usia peserta program tersebut berumur 40 tahun, buta huruf, dan hanya berpenghasilan \$7 per minggu dari penjualan hasil panen seperti wijen dan kacang. Ketika dimulai program tersebut, hanya setengah dari perempuan yang ikut serta dalam program yang merasa terberdayakan di rumah; sisanya banyak dari mereka yang merasa takut kepada suami mereka. Saat ini, sentimen tersebut perlahan berubah. Dengan berperan sebagai penghubung antara kelompok tabungan informal dengan bank, layanan kesehatan, sekolah, dan layanan penyuluhan pertanian, organisasi tersebut membantu perempuan mengambil keputusan yang lebih baik mengenai penggunaan makanan, praktik nutrisi, dan pengeluaran. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperkuat keterampilan pengelolaan aset, yang akan memberi perempuan suara yang lebih besar di komunitas mereka.

2.10 Penanggulangan Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kemiskinan muncul ketika seseorang maupun sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang tidak hanya terkait pendapatan tetapi juga

hal lainnya yang mendukung dalam kelangsungan hidup. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada, hal tersebut dapat berupa program-program dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 – 2019 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.10.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kurangnya kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan menyebabkan masalah kemiskinan yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam realitasnya menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum memperoleh hasil yang maksimal, hal tersebut diperkirakan karena kurangnya koordinasi lembaga terkait dalam penanggulangan kemiskinan.

Terdapat kekeliruan mengenai strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah diterapkan. Penanggulangan kemiskinan hanya berorientasi pada aspek ekonomi dibandingkan dengan aspek lainnya. Seperti yang telah terbukti bahwa terjadi kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan jika hanya fokus pada aspek ekonomi, karena hal tersebut tidak dapat mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Selanjutnya dalam penanggulangan kemiskinan lebih memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, hal tersebut yang sering menyebabkan terjadinya indikasi korupsi dalam penyaluran bantuan program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah sebagai pengambil

keputusan dalam menciptakan program penanggulangan kemiskinan saling bersinergi dan terintegrasi dengan baik.

Dalam Partridge & Rickman (2006) mengusulkan beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sekiranya dapat dilakukan diantaranya adalah:

a. Kebijakan Makroekonomi

Menurut Partridge & Rickman dalam penelitiannya, pertumbuhan nasional yang berkelanjutan mendorong tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja ke titik di mana mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan kerja paling sedikit memiliki waktu untuk keluar dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi membantu memastikan bahwa pekerja yang kurang beruntung mendapatkan pengalaman yang memadai, kepercayaan diri, dan keterampilan lainnya untuk tetap bertahan dipekerjakan secara konsisten. Demikian pula, pertumbuhan nasional yang berkelanjutan membantu memastikan bahwa kemakmuran menjadi tersebar luas secara geografis, karena daerah-daerah yang berkembang pesat akhirnya menghadapi kendala sisi penawaran, yang menyebabkan permintaan bergeser ke daerah-daerah tertinggal. Sehingga, pengurangan kemiskinan harus menjadi tujuan eksplisit dari pembuatan kebijakan ekonomi makro karena berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi dipertahankan.

b. Perolehan Kredit Pajak Penghasilan/Earned Income Tax Credit (EITC)

Seiring dengan strategi penciptaan lapangan kerja seperti keringanan pajak yang ditargetkan, subsidi upah, atau pekerjaan publik, EITC yang ditargetkan pada area yang tertekan akan memberi pekerja yang kurang beruntung dengan sisi penawaran untuk mendorong pekerjaan. Ini harus ditentukan untuk jangka waktu terbatas (seperti dua tahun), untuk mendorong pekerja yang kurang beruntung untuk mendapatkan pengalaman yang cukup dan modal manusia untuk memastikan pekerjaan jangka panjang. Lebih lanjut, kredit tersebut harus dibatasi pada orang-orang yang telah tinggal di daerah sasaran untuk jangka waktu tertentu (katakanlah, satu tahun) untuk mencegah orang pindah agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit. Dorongan sisi penawaran yang terfokus secara

spasial seperti itu mungkin merupakan dorongan yang diperlukan untuk memastikan bahwa program pertumbuhan lapangan kerja yang ditargetkan secara geografis berhasil. Selain itu, bersama dengan subsidi upah yang ditargetkan untuk penduduk zona tertekan, EITC yang berfokus pada penduduk zona yang kurang beruntung juga akan memberikan dorongan bagi mereka untuk mencari pekerjaan yang sesuai di luar zona.

c. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Metropolitan dan Perkotaan

Karena terlihat kurangnya lapangan pekerjaan di sebagian besar wilayah metropolitan besar, kami percaya bahwa strategi anti-kemiskinan metropolitan (perkotaan) yang efektif harus mencakup perusahaan yang ditargetkan secara spasial kebijakan zona yang sangat menguntungkan penduduk zona tersebut

d. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nonmetropolitan

Kurangnya pekerjaan bergaji baik di banyak daerah pedesaan menunjukkan perlunya jenis kebijakan zona perusahaan yang sama di sana yang mereka anjurkan untuk kabupaten pusat kota.

e. Kebijakan Berbasis Orang Wilayah Metropolitan

Terdapat beberapa pendekatan pilihan untuk wilayah metropolitan antara lain adalah:

1. Insentif transportasi yang ditingkatkan untuk memfasilitasi perjalanan bolak-balik ke pinggiran kota yang kaya pekerjaan bermanfaat.
2. mendorong rumah tangga yang kurang beruntung untuk pindah ke daerah yang memiliki ketersediaan pekerjaan lebih besar memiliki beberapa harapan.
3. memberikan peningkatan keterampilan dan pelatihan kepada semua kelompok yang kurang beruntung.
4. Penduduk yang kurang beruntung membutuhkan lebih banyak informasi mengenai peluang kerja, dan mereka membutuhkan konseling untuk meningkatkan keterampilan mencari pekerjaan dan untuk mempertahankan pekerjaan.

f. Kebijakan Berbasis Orang Pedesaan

Sementara banyak kebijakan berbasis orang yang disarankan untuk wilayah metropolitan juga berlaku untuk wilayah nonmetropolitan, penekanan yang berbeda mungkin diperlukan untuk mengatasi kebutuhan khusus untuk area ini. Penekanan khusus harus diberikan untuk kegiatan berikut:

1. Subsidi penitipan anak tampaknya memiliki hasil yang sangat besar untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan (Blau dan Tekin 2003), yang kami temukan sangat terkait dengan pengurangan kemiskinan di daerah nonmetropolitan
2. Program memperoleh transportasi mobil yang andal
3. Diperlukan lebih banyak pelatihan untuk menambah tingkat modal manusia pedesaan yang relatif rendah.

g. Kebijakan Reformasi Kesejahteraan

Reformasi kesejahteraan harus lebih menekankan pada pengurangan kemiskinan daripada pengurangan beban kasus. Program harus mengurangi penekanan penempatan penerima segera ke dalam bentuk pekerjaan apa pun terlepas dari konsekuensi kemiskinan, dan sebaliknya menekankan pemindahan penerima kesejahteraan secara permanen di atas garis kemiskinan. Dukungan finansial yang dibutuhkan untuk mengurangikemiskinan kemungkinan mencakup tindakan-tindakan berikut, beberapa di antaranya tumpang tindih dengan dukungan yang dibutuhkan bagi pekerja miskin secara umum.

1. Berusaha untuk melatih penerima dan mencocokkan keterampilan dan kemampuan mereka dengan penempatan kerja, seperti di negara bagian Washington.
2. Lanjutkan konseling karir setelah penempatan kerja awal sampai penerima memperoleh pekerjaan dengan upah yang memadai danmanfaat kesehatan.
3. Memberikan subsidi yang cukup untuk pengeluaran perawatan anak.
4. Membantu secara finansial penerima saat ini dan baru-baru ini dengan kebutuhan transportasi. Misalnya, bantuan tersebut dapat berupa potongan tunai atau pinjaman berbunga rendah untuk pembelian mobil.

5. Memberikan subsidi perumahan sampai keluarga berada pada tingkat yang mencukupi di atas kemiskinan, dan fokus pada subsidi perumahan di daerah dengan pertumbuhan pekerjaan yang lebih kuat.
6. Subsidi perawatan kesehatan sampai penerima mendapatkan yang disediakan oleh pemberi kerjamaanfaat kesehatan.
7. Cocokkan yang paling tidak beruntung, seperti mereka yang menderita penyakit mental, penyalahgunaan zat, atau penyalahgunaan pasangan, dengan lembaga pelayanan sosial yang sesuai, karena beberapa individu mungkin dapat menjadi mandiri dengan bantuan.

Selain itu Mankiw (2020) juga memberikan beberapa opsi kebijakan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengentasan kemiskinan, diantaranya sebagai berikut.

a. Hukum Upah Minimum

Bagi pekerja dengan tingkat keterampilan dan pengalaman yang rendah, upah minimum yang tinggi memaksa upah di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu meningkatkan biaya tenaga kerja untuk perusahaan dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hasilnya adalah pengangguran yang lebih tinggi di antara mereka kelompok pekerja yang terkena upah minimum. Para pekerja yang tersisa yang dipekerjakan mendapat manfaat dari upah yang lebih tinggi, tetapi mereka yang mungkin telah dipekerjakan dengan upah yang lebih rendah lebih buruk.

b. Kesejahteraan

Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin adalah dengan menambah pendapatan mereka. Cara utama yang dilakukan pemerintah adalah melalui sistem kesejahteraan. **Kesejahteraan** adalah istilah luas yang mencakup berbagai program pemerintah. Bantuan Sementara untuk Keluarga Tidak Mampu (TANF) adalah program yang membantu keluarga dengan anak-anak dan tidak ada orang dewasa yang mampu menghidupi keluarga. Dalam keluarga biasa yang menerima bantuan seperti itu, ayah tidak ada dan ibu

di rumah membesarkan anak-anak kecil. Program kesejahteraan lainnya adalah Supplemental Security Income (SSI), yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang sakit atau cacat. Perhatikan bahwa untuk kedua program kesejahteraan ini, orang miskin tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hanya dengan memiliki pendapatan rendah. Dia juga harus menetapkan beberapa “kebutuhan” tambahan, seperti anak kecil atau disabilitas.

c. **Pajak Penghasilan Negatif**

Setiap kali pemerintah memilih sistem untuk mengumpulkan pajak, itu mempengaruhi distribusi pendapatan. Ini jelas benar dalam kasus pajak penghasilan progresif, di mana keluarga berpenghasilan tinggi membayar persentase yang lebih besar dari penghasilan mereka dalam bentuk pajak daripada keluarga berpenghasilan rendah. Banyak ekonom telah menganjurkan penambahan pendapatan orang miskin menggunakan **pajak penghasilan negatif**. Menurut kebijakan ini, setiap keluarga akan melaporkan pendapatannya kepada pemerintah. Keluarga berpenghasilan tinggi akan membayar pajak berdasarkan pendapatan mereka. Keluarga berpenghasilan rendah akan menerima subsidi. Dengan kata lain, mereka akan “membayar” “pajak negatif.”

Di bawah pajak penghasilan negatif, satu-satunya kualifikasi yang diperlukan untuk menerima bantuan pemerintah adalah penghasilan rendah. Tergantung pada sudut pandang seseorang, fitur ini dapat menjadi keuntungan atau kerugian. Di satu sisi, pajak penghasilan negatif akan menetapkan standar hidup minimum untuk semua orang, apa pun keadaannya. Di sisi lain, pajak penghasilan negatif akan mensubsidi tidak hanya mereka yang tidak beruntung, tetapi juga mereka yang malas dan, di mata beberapa orang, tidak layak mendapat dukungan publik. Salah satu ketentuan pajak aktual yang berfungsi seperti pajak penghasilan negatif adalah Kredit Pajak Penghasilan yang Diperoleh (EITC). Kredit ini memungkinkan keluarga pekerja miskin untuk menerima pengembalian pajak penghasilan yang lebih besar dari pajak yang mereka bayarkan selama tahun tersebut. Karena EITC hanya berlaku untuk pekerja miskin, EITC tidak menghalangi penerima untuk bekerja, seperti program anti kemiskinan lainnya.

Untuk alasan yang sama, bagaimanapun, itu juga tidak membantu mengentaskan kemiskinan karena pengangguran, sakit, atau ketidakmampuan lainnya untuk bekerja.

d. Transfer Barang

Cara lain untuk membantu orang miskin adalah dengan menyediakan secara langsung beberapa barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan standar hidup mereka. Misalnya, badan amal menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan mainan bagi yang membutuhkan saat Natal. Pemerintah memberikan makanan kepada keluarga miskin melalui Program Bantuan Gizi Tambahan, atau SNAP. Program ini, yang menggantikan program serupa yang disebut kupon makanan, memberi keluarga berpenghasilan rendah kartu plastik, seperti kartu debit, yang dapat digunakan untuk membeli makanan di toko. Pemerintah juga memberikan kesehatan kepada banyak orang miskin melalui program yang disebut Medicaid.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan acuan dalam melakukan penelitian. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini dicantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Ryan Ezkirianto dan Muhammad Findi A dalam Analisis Keterkaitan antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita di Indonesia (Ezkirianto & Alexandi, 2013)

Penelitian ini menganalisis hubungan dua arah antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap 33 provinsi di Indonesia pada periode 2006-2011. Faktor penghubung pada masing-masing persamaan dianalisis berdasarkan beberapa penelitian empiris, seperti rata-rata lama sekolah, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, total pengeluaran pemerintah, distribusi pendapatan, dan kepadatan penduduk. Data panel

dianalisis dengan metode *two-stage least square* (2SLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB per kapita.

2. **Hasil Penelitian F. Noorbakhsh dalam Human Development and Regional Disparities in Iran: A Policy Model** (Noorbakhsh, 2002)

Penelitian ini menganalisis tentang Indeks Pembangunan Manusia dan kesenjangan wilayah di Iran dengan membandingkan nilai Indeks Pembangunan Manusia di 26 Provinsi di negara tersebut. Metode yang digunakan adalah menggabungkan data ke dalam indeks komposit pembangunan untuk mengetahui peringkat provinsi berdasarkan indikator-indikator yang dipilih. Hasil dari penelitian ini adalah rumusan konsep dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah di Iran.

3. **Hasil Penelitian Habibullah Khan dan Iyanatul Islam dalam Regional Disparities in Indonesia: A Social Indicators Approach** (Andiyanatul, 1990)

Penelitian ini mengkaji tentang ketidakseimbangan regional di Indonesia dengan meneliti 26 Provinsi di Indonesia pada tahun 1970 dan 1980. Penelitian ini menggunakan sejumlah indikator sosial dan ekonomi yang dipilih, kemudian data tersebut dapat digunakan untuk menentukan peringkat provinsi atau wilayah. Hasil dari penelitian ini berupa temuan empiris tentang disparitas regional.